

CATATAN PENUTUPAN
SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
DALAM RANCANGAN RPJMN 2015-2019 BERDIMENSI KEWILAYAHAN
FORUM KEPALA BAPPEDA SE-KAWASAN TIMUR INDONESIA KE-X
MATARAM, 25 JUNI 2014

1. Upaya mewujudkan kehidupan yang lebih mandiri, makmur, sejahtera, adil, dan merata di seluruh wilayah tanah air telah menjadi kesepakatan dan komitmen bangsa Indonesia. Pencapaian tujuan pembangunan nasional tersebut tidak hanya dilakukan dengan pembangunan sektoral yang parsial, namun perlu pembangunan wilayah yang komprehensif dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian berbagai sumberdaya sebagai unsur pembentuk utama ruang, dengan didukung oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang andal.
2. Reformulasi kebijakan pengembangan wilayah untuk mendorong perekonomian nasional menjadi penting dan mendesak dalam menghadapi era globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi. Dalam hal ini, pemahaman yang utuh, lengkap dan jernih terhadap potensi dan isu strategis wilayah akan membantu perumusan kebijakan pembangunan yang lebih akurat, efektif, dan efisien untuk mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan nasional, mendorong pemerataan antardaerah, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
3. Berbagai pokok-pokok pikiran yang berkembang dalam forum yang diselenggarakan hari ini menjadi masukan penting dalam penyusunan rancangan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah 2015-2019. Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019 yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas serta kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
4. Berdasarkan hasil diskusi dalam forum yang diselenggarakan pada hari ini terdapat beberapa catatan penting yang perlu kita cermati sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan; maupun arah kebijakan pembangunan Kawasan Timur Indonesia di tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Pertama: Kita menyadari ada fakta dan masalah tentang belum optimalnya kinerja pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia serta pentingnya kesepakatan atau cita-cita bersama memajukan wilayah Kawasan Timur Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya perwujudan pemerataan bersama-sama dengan pertumbuhan sehingga pembangunan sektoral harus selaras dengan pembangunan wilayah. Oleh sebab itu, perlu pemahaman yang lebih utuh, konkrit dan lugas tentang struktur keterkaitan antarsektor dalam setiap wilayah, mekanisme transaksi ekonomi antarwilayah, pemilihan

minimum dalam bidang : (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) air bersih dan air minum; (4) perumahan; (5) listrik;

- Usulan rencana program, kegiatan dan dana untuk peningkatan daya saing dengan penetapan sektor dan komoditas unggulan;
- Usulan perluasan kerjasama dan perdagangan intra daerah dan antardaerah.
- Penyiapan *safeguarding* (pengendalian dan evaluasi) dalam bidang : (1) penyiapan lahan; (2) penyiapan regulasi; (3) penyiapan organisasi dan manajemen; (4) penyiapan skema pembiayaan.

Ketujuh: *Smart practices* perlu di perdakan dengan kondisi dan persyaratan. Oleh sebab itu, Forum Kawasan Timur Indonesia dan BaKTI perlu mengupas dan menjelaskan syarat-syarat replikasi *smart practices*.

Kedelapan: Bappeda perlu menyiapkan usulan, langkah dan rencana konkret 2015-2019 terkait bidang (1) pelayanan dasar; (2) penguatan daya saing daerah (sektor dan komoditas); serta (3) pengembangan kerjasama dan perdagangan antardaerah dan antar negara.

Kesembilan: Bappenas dan Kementerian Keuangan perlu lebih berperan aktif kembali dalam melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antar Kementerian/Lembaga yang pada saat ini dipandang masih banyak yang belum sinkron dan saling terkait antara perencanaan antar Kementerian/Lembaga. Upaya ini diperlukan agar perencanaan dari pusat dan daerah yang berpihak kepada pembangunan Kawasan Timur Indonesia dapat berjalan secara efektif.

Kesepuluh: Terkait dengan segera disusunnya Rancangan RPJMN 2015-2019 dalam dimensi kewilayahan, maka Pemerintah Daerah melalui Kepala Bappeda Provinsi perlu memberikan masukan terkait rencana dan kegiatan prioritas serta indikasi kebutuhan pendanaan baik dari pusat dan daerah yang dapat mendorong pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Masukan dari Pemerintah Daerah di Kawasan Timur Indonesia akan dikoordinasikan oleh Forum KTI dan Yayasan Bakti untuk kemudian disampaikan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah) pada tanggal 7 Juli 2014.

5. Demikian catatan Kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Dalam Rancangan RPJMN 2015-2019 Berdimensi Kewilayahan Dalam Forum Kepala Bappeda Se-Kawasan Timur Indonesia Ke-X di Mataram pada tanggal 25 Juni 2014.

kerangka investasi dan kerangka regulasi dalam mendukung pembangunan wilayah.

Kedua: Ke depan Kawasan Timur Indonesia perlu diprioritaskan pada kemandirian ekonomi yang difokuskan pada pangan dan energi. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah perubahan iklim yang akan berpengaruh pada pertanian. Oleh karena itu, perumusan kebijakan pembangunan wilayah harus selalu memperhitungkan keterkaitan antara (1) tujuan ekonomi untuk mendorong kemajuan ekonomi wilayah, (2) tujuan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, dan (3) tujuan ekosistem untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Ketiga: Pentingnya pembangunan infrastruktur (jalan, air bersih, listrik, transportasi dan telekomunikasi) yang terintegrasi dengan memperhatikan negara kepulauan dalam mendorong pembangunan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Infrastruktur menjadi perekat yang mendorong keterkaitan ekonomi antarwilayah, menghubungkan kawasan maju dan kawasan tertinggal, dan sekaligus memperlancar perpindahan orang dan barang secara lebih cepat dan efisien.

Keempat: Keterbatasan sumberdaya yang ada, khususnya dalam hal pendanaan dari Pemerintah Pusat memberikan konsekuensi bahwa perencanaan pembangunan ke depan harus dihadapkan untuk memilih wilayah strategis (Pusat Kegiatan Nasional – PKN) sesuai dengan RTRWN/RTRWP/RTRWK yang memiliki keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk mendorong daya saing wilayah. Di samping itu, pembiayaan (pendanaan) Pusat ke Daerah diyakini akan menjadi faktor pengungkit pembangunan di Kawasan Timur Indonesia, sehingga peran Pemerintah Pusat menjadi sangat penting dibanding peran swasta dalam mendorong pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

Kelima: Secara umum, Kementerian Lembaga telah mengalokasikan anggaran pusat ke wilayah KTI dalam jumlah berimbang dengan Kawasan Barat Indonesia dan mengalami peningkatan, namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana alokasi anggaran tersebut dapat mengakselerasi pembangunan di wilayah KTI. Di lain sisi, hambatan-hambatan pembangunan (seperti pembebasan lahan) di wilayah KTI juga perlu menjadi perhatian bersama baik Pemerintah Pusat dan Daerah (Provinsi) sehingga kontribusi pembangunan dari Pemerintah Pusat ke daerah dapat berjalan lancar.

Keenam: Ke depan langkah yang harus segera kita dilakukan untuk mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI adalah sebagai berikut:

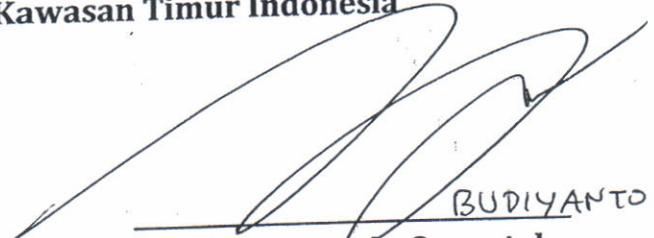
- Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan 2015-2019;
- Usulan rencana program kegiatan dan pendanaan 2015-2019 dalam peningkatan pelayanan dasar untuk memenuhi standar pelayanan

Mataram, 25 Juni 2014
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia
Dalam Rancangan RPJMN 2015-2019
Berdimensi Kewilayahan
Forum Kepala Bappeda Se-Kawasan Timur Indonesia



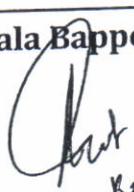
MUTU MOKOGINTA

A.n. Kepala Bappeda Sulawesi Utara



BUDIYANTO SIDIKI

Kepala Bappeda Gorontalo



KHOTAMAN ARNANAS

A.n. Kepala Bappeda Sulawesi Tengah

AGUSSALIM TAMADJOE

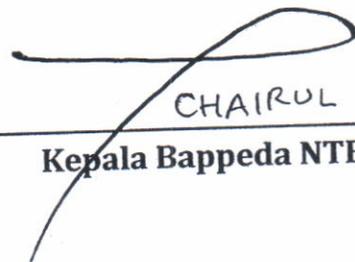
Kepala Bappeda Sulawesi Barat



AMRANI SAMAD

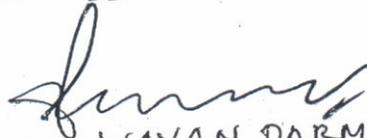
A.n. Kepala Bappeda Sulawesi Selatan

Kepala Bappeda Sulawesi Tenggara



CHAIRUL MAHSUL

Kepala Bappeda NTB



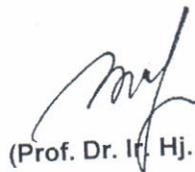
WAYAN DARMAWA

Kepala Bappeda NTT



DHENNI TJAN

A.n. Kepala Bappeda Maluku Utara



(Prof. Dr. Ir. Hj. Winarni Monoarfa, MS)

Ketua Pokja Forum KTI